



**KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR :     TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA (RENJA)  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2020**

**NOMOR :     /RENJA-(BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH)/2019**

**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-5
<b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT           DAERAH TAHUN LALU.....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II-10
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPK.....	II-11
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-16
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi.....	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	III-2
3.3. Program dan Kegiatan.....	III-3
<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	<b>IV-1</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2018.....	II-6
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-9
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPK Lhokseumawe Tahun 2020.....	II-12
Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020.....	II-17
Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021.....	III-4

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pelaksana pemerintah daerah. Renja Perangkat Daerah juga berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah akan sangat menentukan kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPK dan RPJMK serta Tata Cara Perubahan RPJPK, RPJMK dan RKPK. Proses penyusunan renja dimulai dengan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi. Selanjutnya, menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kemudian perumusan tujuan dan sasaran dihasilkan melalui review atas evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Penyusunan Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta penelaahan dari rancangan awal RKPK. Lebih lanjut, perumusan program dan kegiatan didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan musrenbang dan hasil reses anggota DPRK Lhokseumawe.

Dalam Pasal 16 ayat 2 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama. Tahapan pertama yaitu persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah,

penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Tahapan yang kedua yaitu penyusunan rancangan awal dan penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Tahapan terakhir adalah penetapan Renja Perangkat Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain seperti RKPK dan Renstra Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan seperti Renstra Perangkat Daerah, RKPK dan RPJMK. Maka, dalam proses penyusunannya Renja Perangkat Daerah dilakukan secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Disamping itu, Renja Perangkat Daerah akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah dalam menyusun Anggaran Belanja Pendapatan Kota (APBK) serta dasar dalam mengusulkan program/kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Propinsi dan APBN.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Perangkat Daerah, disusun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul dalam satu tahunanggaran. Renja juga mempunyai arti yang strategis karena merupakan dokumen yang secara substansial menerjemahkan visi, misi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
21. Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
22. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
23. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Panjang Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
25. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2020;
26. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022;
27. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019;

### **I.3. Maksud Dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah dan menjadi alat ukur penilaian kinerja BPBD Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Sebagai rumusan program dan kegiatan pembangunan BPBD Kota Lhokseumawe untuk tahun 2020.
2. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2020.
3. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan turunan dari RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2020.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPK, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya terhadap proses penyusunan RAPBK.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat tentang landasan hukum penyusunan Renja seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, yang menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan Perangkat Daerah.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi Renja Perangkat Daerah.



## **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK, SPM, maupun IKK.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, kemudian permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Selanjutnya, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*), kemudian tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPK**

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPK dengan hasil analisis kebutuhan, kemudian penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan. Selanjutnya, penjelasan temuan-

temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPK, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPK, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda atas hasil telaahan Perangkat Daerah terhadap rancangan awal RKPK.

### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berisikan uraian atas hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat pada tahun 2020 diperoleh melalui perencanaan secara elektronik (*e-Planning*) yaitu aplikasi e-musrenbang.

## **BAB III. TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan penelaahan pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran strategis Perangkat Daerah.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan maju Tahun 2021.

## **BAB IV. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran yang dibutuhkan, kemudian kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT**  
**DAERAH TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Pada tahun 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe telah melaksanakan 6 program dan 22 kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp. 11.272.291.835,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.696.866.390,- sehingga persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah Tahun 2018 adalah sebesar 94.90 % yang termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dapat diuraikan kegiatan beserta capaian indikator kinerjanya dengan kategori sebagai berikut:

- A. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :
  - a. program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, terdiri dari 1 kegiatan, dan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan disebabkan tidak adanya undangan kegiatan untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia khususnya untuk anggota pemadam kebakaran sehingga anggarannya digeser untuk kegiatan lainnya .
  - b. program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, terdiri dari 4 kegiatan, namun ada 1 kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yaitu Kegiatan Pelatihan dan Pembekalan Teknis Pemadam Kebakaran, dimana kegiatan ini batal dilaksanakan dan akan kembali dilaksanakan pada Tahun 2019.
  
- B. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :
  - a. program pelayanan administrasi perkantoran, terdiri dari 10 Kegiatan yaitu:

- penyediaan jasa surat menyurat, dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.550.000,- terealisasi sebesar Rp. 990.000,- atau 38,82% dengan output periode penyediaan benda pos dan paket pengiriman 12 Bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
- penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dari rencana anggaran sebesar Rp. 156.023.397,- terealisasi sebesar Rp. 73.856.840,- atau 47,34% dengan output periode tersedianya penerangan dan alat-alat komunikasi 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
- penyediaan jasa administrasi keuangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 128.274.070,- terealisasi sebesar Rp. 128.212.235,- atau 99,95% dengan output jumlah pejabat pengelola keuangan SKPK 240 OB terealisasi 240 OB atau 100%.
- penyediaan alat tulis kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 17.097.215,- terealisasi sebesar Rp. 16.509.395,- atau 96,56% dengan output periode tersedianya alat tulis kantor 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
- penyediaan barang cetakan dan pengandaan dari rencana anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.822.375,- atau 98,03% dengan output periode tersedianya barang cetakan dan pengandaan 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
- penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 4.596.750,- terealisasi sebesar Rp. 3.275.055,- atau 71,25% dengan output periode tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
- penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.140.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.140.000,- atau 100% dengan output periode tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

- penyediaan makanan dan minuman dari rencana anggaran sebesar Rp. 6.450.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.597.500,- atau 24,77% dengan output periode tersedianya makanan dan minuman rapat kantor untuk 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
  - rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 129.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 116.483.700,- atau 90,30% dengan output periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.
  - penyediaan jasa pegawai tidak tetap dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.007.315.731,- terealisasi sebesar Rp. 1.804.561.787,- atau 89,90% dengan output jumlah pegawai tidak tetap 1.356 OB terealisasi 1.356 OB atau 100%.
- b. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari 5 kegiatan yaitu:
- pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.805.000,- atau 74,03% dengan output jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 4 jenis terealisasi 3 jenis atau 75%.
  - pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 32.910.000,- terealisasi sebesar Rp. 32.801.500,- atau 99,67% dengan output periode pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama 12 bulan terealisasi 12 bulan atau 100%.
  - pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dari rencana anggaran sebesar Rp. 33.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 33.001.500,- atau 98,22% dengan output pemeliharaan mobil jabatan 1 unit terealisasi 1 unit atau 100%.
  - pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional dari rencana anggaran sebesar Rp. 256.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 222.213.710,- atau 86,80% dengan output pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 9 unit terealisasi 9 unit atau 100%.

- pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 78.920.600,- terealisasi sebesar Rp. 76.020.600,- atau 96,33% dengan output pemeliharaan peralatan / perlengkapan kantor 29 unit terealisasi 29 unit atau 100%.
- c. program peningkatan disiplin aparatur, terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
- pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan anggaran sebesar Rp. 54.036.000,- terealisasi sebesar Rp. 54.036.000,- atau 100% dengan output lunasnya utang tahun 2016 terealisasi lunasnya utang tahun 2016 atau 100%.
- d. program penyusunan perencanaan satuan kerja perangkat kerja, terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
- penyusunan rencana kerja (Renja) satuan kerja perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.699.800,- atau 99,99% dengan output tersedianya 10 buku Renja terealisasi 10 buku Renja atau 100%.
- e. program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, terdiri dari 3 kegiatan yaitu:
- monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan anggaran sebesar Rp. 97.835.610,- terealisasi sebesar Rp. 96.000.000,- atau 98,12% dengan output periode monitoring, evaluasi dan pelaporan selama 12 bulan terealisasi 12 bulan atau 100%.
  - pengiriman dan pendistribusian logistik penanggulangan bencana dengan anggaran sebesar Rp. 33.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.918.380,- atau 72,48% dengan output tersedianya pengiriman dan pendistribusian logistik penanggulangan bencana selama 12 bulan terealisasi 12 bulan atau 100%.
  - rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan anggaran sebesar Rp. 8.174.879.098,- terealisasi sebesar Rp. 7.986.921.013,- atau 97,70% dengan output tersedianya 1

sarana dan prasarana pasca bencana terealisasi 1 sarana atau 100%.

- C. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
  - Untuk realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada (nihil).
- D. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
  - a. faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan pada Perangkat Daerah Tahun 2018 karena adanya ketidak sesuaiaan antara kegiatan dan anggaran yang dialokasikan.
  - b. faktor pendukung tercapainya kinerja program/kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2018 adalah karena penyusunan rencana anggaran, sumber daya aparatur yang ada di Perangkat Daerah sangat mendukung pelaksanaan program/kegiatan tersebut.
- E. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Dengan terlaksananya program/kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018 telah mendukung pencapaian kinerja Perangkat Daerah seperti Tersedianya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel. 2.1 (T-C.29)**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah**  
**dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah**  
**s.d Tahun 2018**

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD s>d tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)						
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7*100		10 = 6 + 9		11 = 10/5*100						
	<b>4.01</b>		<b>Urusan Wajib</b>																			
	<b>4.01.09</b>		<b>Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan</b>																			
<b>1</b>	<b>4.01.09.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>9.787.387.194</b>		<b>-</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2.461.447.163</b>	<b>8</b>	<b>Keg</b>	<b>2.155.448.887</b>		<b>2.155.448.887</b>						
		01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode jasa surat menyurat	60	Bulan	12.900.000	Bulan	12	Bulan	2.550.000	12	Bulan	990.000	100,00	38,82	12	Bulan	990.000	20,00	7,67	
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan	906.620.911	Bulan	12	Bulan	156.023.397	12	Bulan	73.856.840	100,00	47,34	12	Bulan	73.856.840	20,00	8,15
			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD	1200	OB	653.785.860	OB	240	OB	128.274.070	240	OB	128.212.235	100,00	99,95	240	OB	128.212.235	20,00	19,61
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	60	Bulan	99.817.215	Bulan	12	Bulan	17.097.215	12	Bulan	16.509.395	100,00	96,56	12	Bulan	16.509.395	20,00	16,54
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60	Bulan	55.000.000	Bulan	12	Bulan	9.000.000	12	Bulan	8.822.375	100,00	98,03	12	Bulan	8.822.375	20,00	16,04
			13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Bulan	31.596.750	Bulan	12	Bulan	4.596.750	12	Bulan	3.275.055	100,00	71,25	12	Bulan	3.275.055	20,00	10,37
			15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Periode Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	60	Bulan	6.487.500	Bulan	12	Bulan	1.140.000	12	Bulan	1.140.000	100,00	100,00	12	Bulan	1.140.000	20,00	17,57
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	60	Bulan	37.000.000	Bulan	12	Bulan	6.450.000	12	Bulan	1.597.500	100,00	24,77	12	Bulan	1.597.500	20,00	4,32
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Luar)	Periode rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	60	Bulan	502.900.000	Bulan	12	Bulan	129.000.000	12	Bulan	116.483.700	100,00	90,30	12	Bulan	116.483.700	20,00	23,16
			20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	6780	OB	7.481.278.958	OB	1.356	OB	2.007.315.731	1.356	OB	1.804.561.787	100,00	89,90	1.356	OB	1.804.561.787	20,00	24,12
												Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,69					20,00	14,76	
												Predikat kinerja		ST	S							
<b>2</b>	<b>4.01.09.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.967.550.931</b>			<b>100</b>	<b>%</b>	<b>421.430.600</b>	<b>4</b>	<b>Keg</b>	<b>378.842.310</b>		<b>378.842.310</b>						
		02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29	Jenis	199.041.000	Jenis	4	Jenis	20.000.000	3	Jenis	14.805.000	75,00	74,03	3	Jenis	14.805.000	10,34	7,44	
			22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	60	Bulan	126.910.000	Bulan	12	Bulan	32.910.000	12	Bulan	32.801.500	100,00	99,67	12	Bulan	32.801.500	20,00	25,85
			23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	60	UB	175.810.000	UB	12	UB	33.600.000	12	UB	33.001.500	100,00	98,22	12	UB	33.001.500	20,00	18,77
			24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional	720	UB	1.327.984.905	UB	108	UB	256.000.000	108	UB	222.213.710	100,00	86,80	108	UB	222.213.710	15,00	16,73
			30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Bulan	137.805.026	Bulan	12	Bulan	78.920.600	12	Bulan	76.020.600	100,00	96,33	12	Bulan	76.020.600	20,00	55,17
												Rata-rata capaian kinerja (%)		95,00	91,01					17,07	24,79	
												Predikat kinerja		ST	ST							



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD s>d tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7*100		10 = 6 + 9		11 = 10/5*100				
3	4.01.09.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100	%	329.895.184		100	%	54.036.000	1	Keg	54.036.000							
		03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari-Hari Tertentu	324	Psg	329.895.184		98	Psg	54.036.000	98	Psg	54.036.000	100,00	100,00	98	Psg	54.036.000	30,25	16,38
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	100,00					30,25	16,38	
Predikat kinerja												ST	ST							
5	4.01.09.07	Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	100	%	17.050.000		100	%	1.700.000		Keg	1.699.800							
		02 Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Jumlah Buku RENJA SKPD	50	Buku	7.726.120		10	Buku	1.700.000	10	Buku	1.699.800	100,00	99,99	10	Buku	1.699.800	20,00	22,00
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	99,99					20,00	22,00	
Predikat kinerja												ST	ST							
6	4.01.09.35	Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan Kegiatan Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	100	%	1.197.300.000		3	Keg	8.333.678.072	3	Keg	8.106.839.393							
		35.09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Periode Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	60	Bulan	553.610.700		12	Bulan	97.835.610	12	Bulan	96.000.000	100,00	98,12	12	Bulan	96.000.000	20,00	17,34
		14 Pengiriman dan Pendistribusian Logistik Penanggulangan bencana	Periode Pengiriman dan Pendistribusian Logistik	60	Bulan	197.000.000		12	Bulan	33.000.000	12	Bulan	23.918.380	100,00	72,48	12	Bulan	23.918.380	20,00	12,14
		19 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pasca Bencana	5	Lokasi	8.178.879.098		1	Lokasi	8.174.879.098	1	Lokasi	7.986.921.013	100,00	97,70	1	Lokasi	7.986.921.013	20,00	97,65
		21 Pelatihan dan Pembekalan Teknis Pemadam Kebakaran	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran yang terlatih	98	Org	76.950.364		98	Org	27.963.364	-	Org	-	-	-	-	Org	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)												75,00	67,08					15,00	31,78	
Predikat kinerja												S	R							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)										ST	T									

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya\*) :

\*) coret yang tidak perlu

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe. BPBD adalah unsur pendukung tugas walikota dalam urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penanggulangan bencana. Berikut tabel pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah sampai dengan Tahun 2018:

**Tabel 2.2 (T-C.30)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	Indikator	NSPK/ SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	<b>Indikator Kinerja Daerah</b>											
1	Cakupan Pelayanan bencana Kebakaran			18,39	18,39	18,39	18,39	18,39	18,39	18,39	18,39	
2	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)			100	100	100	100	100	100	100	100	
	<b>Indikator Kinerja Utama</b>											
3	Kategori Evaluasi SAKIP			CC	C	BB	BB	CC	CC	BB	B	

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan tugas dan fungsinya, isu-isu penting yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan yaitu masih belum optimalnya koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan, lingkungan hidup dan perubahan iklim, dan juga belum optimalnya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penanggulangan bencana melalui pendidikan formal dan non-formal (pelatihan dan kursus). Adapun strategi Perangkat Daerah dalam mengantisipasi persoalan tersebut adalah sebagai berikut:

1. penyediaan kajian risiko bencana, peningkatan sosialisasi pengurangan risiko bencana dan penyediaan pedoman operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
2. memulai upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana.
3. pengelolaan sumberdaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara efektif dan efisien dimulai dengan membangun sistem data informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana.
4. membangun sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan pengerahan sumberdaya manusia untuk tanggap darurat bencana yang cepat, efektif dan efisien.
5. mengoptimalkan penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
6. penataan program, kurikulum dan jadwal pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.
7. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.
8. peningkatan sarana dan prasarana data dan informasi untuk penghimpunan dan diseminasi data dan informasi kebencanaan.
9. pengembangan TIK dan Pusdalops di BPBD Kota Lhokseumawe.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPK**

Review rancangan awal RKPK dengan analisis kebutuhan Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan penting. Perbandingan antara rencana pembangunan dengan kemampuan keuangan dilakukan melalui seleksi program/kegiatan yang sesuai dengan skala prioritas daerah.

Dengan berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada baik dari tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, RKPK Tahun 2020 ditetapkan lebih mengarah kepada 7 Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe, sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Agama, Sosial dan Budaya;
5. Ekonomi;
6. Infrastruktur;
7. Lingkungan Hidup.

Dengan ditetapkannya prioritas pembangunan, maka penetapan skala prioritas pembangunan akan menjadi lebih mudah dan jelas dalam melaksanakan perencanaan, koordinasi, sinkronisasi maupun pelaksanaan kegiatan. Berkaitan dengan prioritas pembangunan, BPBD Kota Lhokseumawe berada pada prioritas ke satu yakni Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan. Review terhadap rancangan awal RKPK Tahun 2020 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 disajikan pada tabel 2.3 berikut:

**Tabel 2.3 (T-C.31)**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPK Lhokseumawe Tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe

Lembar ... dari ...

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan</b>					<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>					<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>					
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>2.965.188.000,00</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>2.965.188.000,00</b>	
	<b>Belanja Langsung</b>				<b>5.621.602.313,00</b>	<b>Belanja Langsung</b>				<b>9.451.073.560,00</b>	
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Tingkat kelancaran administrasi kantor</b>	<b>100%</b>	<b>1.926.607.627,00</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Tingkat kelancaran administrasi kantor</b>	<b>100%</b>	<b>2.618.740.000,00</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Periode Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	2.550.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Periode Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	2.550.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Periode Tersedianya Penerangan dan Alat-alat komunikasi	12 Bulan	188.695.930,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Periode Tersedianya Penerangan dan Alat-alat komunikasi	12 Bulan	238.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD	240 OB	128.274.070,00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD	240 OB	129.200.000,00	
	Penyediaan Alat tulis Kantor		Periode tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	20.320.000,00	Penyediaan Alat tulis Kantor		Periode tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	20.320.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Periode penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	11.500.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Periode penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	15.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Periode penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	6.500.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Periode penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	10.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Periode penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	1.320.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Periode penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	1.320.000,00	
	Penyediaan Makanan dan Minuman		Periode penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	7.000.000,00	Penyediaan Makanan dan Minuman		Periode penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	7.000.000,00	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		Periode pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dalam/luar daerah	12 Bulan	100.000.000,00	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		Periode pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dalam/luar daerah	12 Bulan	120.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap		Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap	1356 OB	1.460.447.627,00	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap		Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap	1356 OB	2.075.350.000,00	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>		<b>100%</b>	<b>422.858.426,00</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>		<b>100%</b>	<b>3.450.050.000,00</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	38.499.000,00	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	6 Jenis	206.300.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	22.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	35.000.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan		Jumlah Mobil jabatan yang terpelihara	1 unit	37.200.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan		Jumlah Mobil jabatan yang terpelihara	1 unit	37.200.000,00	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	11 unit	256.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	11 unit	259.000.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	29 unit	19.159.426,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	29 unit	52.550.000,00	
	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor		Jumlah fasilitas gedung kantor yang di bangun	1 Paket	50.000.000,00	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor		Jumlah fasilitas gedung kantor yang di bangun	1 Paket	2.860.000.000,00	
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>		<b>100%</b>	<b>65.383.560,00</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>		<b>100%</b>	<b>78.783.560,00</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah pengadaan baju dinas beserta perlengkapannya	67 Pasang	65.383.560,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah pengadaan baju dinas beserta perlengkapannya	67 Pasang	78.783.560,00	
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>		<b>100%</b>	<b>36.300.000,00</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>		<b>100%</b>	<b>36.300.000,00</b>	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Periode Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	12 Bulan	36.300.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Periode Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	12 Bulan	36.300.000,00	
<b>5</b>	<b>Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>		<b>100%</b>	<b>2.452.000,00</b>	<b>Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>		<b>100%</b>	<b>12.550.000,00</b>	
	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah		Jumlah buku renja SKPD	10 buku	1.452.000,00	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah		Jumlah buku renja SKPD	10 buku	2.850.000,00	



No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Standart Pelayanan Minimum (SPM)		Jumlah buku SPM	10 buku	1.000.000,00	Penyusunan Standart Pelayanan Minimum (SPM)		Jumlah buku SPM	10 buku	9.700.000,00	
<b>6</b>	<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>		<b>100%</b>	<b>3.168.000.700,00</b>	<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>		<b>100%</b>	<b>3.254.650.000,00</b>	
	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam		Periode Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	12 Bulan	29.000.000,00	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam		Periode Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	12 Bulan	37.400.000,00	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Periode monitoring, evaluasi dan laporan	12 Bulan	100.000.700,00	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Periode monitoring, evaluasi dan laporan	12 Bulan	148.000.000,00	
	Pengiriman dan Pendistribusian Logistik Penanggulangan Bencana		Periode pengambilan dan pendistribusian barang dalam rangka penanggulangan bencana	12 Bulan	39.000.000,00	Pengiriman dan Pendistribusian Logistik Penanggulangan Bencana		Periode pengambilan dan pendistribusian barang dalam rangka penanggulangan bencana	12 Bulan	43.000.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran (OTSUS)		Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Water Supply	2 Unit	3.000.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran (OTSUS)		Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Water Supply	2 Unit	3.026.250.000,00	
<b>Jumlah</b>					<b>5.621.602.313,00</b>	<b>Jumlah</b>					<b>9.451.073.560,00</b>

## **2.5. Penelaahan Usulan Masyarakat**

Penelaahan usulan masyarakat dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dirumuskan melalui kegiatan Musrenbang Kota Lhokseumawe Tahun 2019. Pelaksanaan Musrenbang didukung dengan aplikasi yaitu *e-planning* yang meliputi *e-musrenbang* dan *i-ren*. Selain itu, penelaahan usulan masyarakat juga diperoleh melalui hasil reses Anggota Legislatif yang juga dirumuskan melalui aplikasi tersebut. Berikut tabel usulan program dan kegiatan berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat:

**Tabel 2.4 (T-C.32)**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah: BPBD Kota Lhokseumawe

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		<b>NIHIL</b>			

Catatan :

Program/Kegiatan merupakan hasil Musrenbang dan Reses Anggota Legislatif.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi**

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 telah ditetapkan tema pembangunan yaitu “Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan Lima (5) Prioritas Pembangunan Nasional seperti :

1. pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
2. pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan koneksifitas dan kemaritiman.
3. peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif.
4. pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air.
5. stabilitas kemananan nasional dan kesuksesan pemilu.

Sementara itu, Tema Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2020 adalah “Pengembangan Kawasan Strategis dan Konektifitas untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan Delapan (8) Prioritas Pembangunan Aceh seperti :

1. penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
2. peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan.
3. pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan kawasan strategis dan penguatan konektifitas;
4. peningkatan ketahanan pangan dan energi.
5. penguatan dinul islam dan peningkatan kualitas pendidikan.
6. peningkatan investasi dan nilai tambah hasil pertanian, industri kreatif, dan pariwisata.
7. optimalisasi sumberdaya alam berkelanjutan dan penurunan resiko bencana.
8. penataan reformasi birokrasi dan penguatan perdamaian.

Guna menjaga sinergitas pembangunan mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, diperlukan telaahan terhadap setiap kebijakan prioritas pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui forum Konsultasi Publik RKPK Tahun

2020 telah menyepakati tema pembangunan untuk tahun 2020 yaitu “Pembangunan Aparatur Pemerintahan Berintegritas Serta Penguatan Kinerja Keuangan Yang Akuntabel” dengan Tujuh (7) Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe seperti:

1. penguatan dinul islam, sosial dan budaya.
2. pembangunan ekonomi, industri dan pariwisata.
3. peningkatan kualitas pendidikan.
4. peningkatan pelayanan kesehatan.
5. penataan reformasi birokrasi pemerintah.
6. pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup.
7. peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

BPBD Kota Lhokseumawe merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi penunjang urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penanggulangan bencana. Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe diatas diketahui bahwa BPBD Kota Lhokseumawe akan mendukung prioritas ke-5 yaitu Penataan Reformasi Birokrasi Pemerintah.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi Daerah. Penetapan tujuan akan mengarahkan pada perumusan arah kebijakan serta penetapan program dan kegiatan yang terukur dan terarah. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang fokus, spesifik, dan dapat dicapai.

Tujuan BPBD Kota Lhokseumawe yang telah dirumuskan dalam Renstra BPBD Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 berdasarkan Visi dan Misi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah adalah “Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang Tangguh dalam Penanggulangan Bencana Secara Terencana, Terkoordinir, dan Terpadu Di Pemerintah Kota Lhokseumawe”. Sasaran yang akan dicapai yaitu:

1. mewujudkan kecepatan respon dan kapasitas sumberdaya manusia dalam penanganan darurat bencana dan peningkatan pelayanan terhadap korban bencana;

2. mewujudkan ketangguhan sumberdaya manusia dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
3. membangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi melalui Pusdalops Penanggulangan Bencana.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

BPBD Kota Lhokseumawe mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Walikota Lhokseumawe dalam urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penanggulangan bencana. Dalam upaya mengsucceskan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Tahun 2020 telah disusun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 sebagaimana dirangkum dalam Tabel 3.1.

Pada Tahun 2020 BPBD Kota Lhokseumawe melaksanakan 6 Program dan 24 Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

1. program pelayanan administrasi perkantoran, dengan 10 kegiatan.
2. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan 6 kegiatan.
3. program peningkatan disiplin aparatur, dengan 1 kegiatan.
4. program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan 1 kegiatan.
5. program penyusunan perencanaan satuan kerja perangkat kerja, dengan 2 kegiatan.
6. program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, dengan 4 kegiatan.

**Tabel 3.1 (T-C.33)**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021**

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Urusan: Wajib</b>								
	<b>Bidang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan</b>								
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat kelancaran administrasi kantor</b>	Lhokseumawe	100%	2.618.740.000	APBK		100%	2.928.568.500
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	2.550.000			12 Bulan	3.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Tersedianya Penerangan dan Alat-alat komunikasi		12 Bulan	238.000.000			12 Bulan	254.000.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD		240 OB	129.200.000			240 OB	145.000.000
	Penyediaan Alat tulis Kantor	Periode tersedianya alat tulis kantor		12 Bulan	20.320.000			12 Bulan	24.125.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Periode penyediaan barang cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	15.000.000			12 Bulan	18.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		12 Bulan	10.000.000			12 Bulan	12.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Periode penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 Bulan	1.320.000			12 Bulan	1.520.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode penyediaan makanan dan minuman		12 Bulan	7.000.000			12 Bulan	10.000.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Periode pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dalam/luar daerah		12 Bulan	120.000.000			12 Bulan	135.000.000
	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Pegawai Tidak Tetap		1309 OB	2.075.350.000			1309 OB	2.325.923.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>100%</b>	<b>3.450.050.000</b>			<b>100%</b>	<b>1.510.015.100</b>
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>								
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor		8 Jenis	206.300.000			5 Jenis	176.500.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		2 Gedung	35.000.000			2 Gedung	45.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil jabatan yang terpelihara		1 unit	37.200.000			1 unit	39.750.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		11 unit	259.000.000			11 unit	343.265.100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		29 unit	52.550.000			29 unit	55.500.000
	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Jumlah fasilitas gedung kantor yang dibangun		1 Paket	2.860.000.000			2 Unit	850.000.000
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			<b>100%</b>	<b>78.783.560</b>			<b>100%</b>	<b>147.650.000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan baju dinas beserta perlengkapannya		36 Pasang	78.783.560			98 Pasang	147.650.000
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>100%</b>	<b>36.300.000</b>			<b>100%</b>	<b>40.000.000</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Periode Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur		25 Orang	36.300.000			20 Orang	40.000.000
	<b>Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja</b>			<b>100%</b>	<b>12.550.000</b>			<b>100%</b>	<b>13.235.000</b>
	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah buku renja SKPD		10 buku	2.850.000			10 buku	3.535.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Standart Pelayanan Minimum (SPM)	Jumlah buku SPM		10 buku	9.700.000			10 buku	9.700.000
	<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>			<b>100%</b>	<b>3.254.650.000</b>			<b>100%</b>	<b>6.715.875.000</b>
	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Periode Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam		12 Bulan	37.400.000			12 Bulan	45.000.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Periode Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		12 Bulan	148.000.000			12 Bulan	135.875.000
	Pengiriman dan Pendistribusian Logistik Penanggulangan Bencana	Periode pengambilan dan pendistribusian barang dalam rangka penanggulangan bencana		12 Bulan	43.000.000			12 Bulan	35.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran (OTSUS)	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Water Supply		2 Unit	3.026.250.000			3 Unit	6.500.000.000

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan pedoman bagi BPBD Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Renja ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPBD Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020. Guna menjamin terlaksananya program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah secara terarah, efektif dan efisien, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh bidang kerja di lingkungan BPBD Kota Lhokseumawe berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2020 secara sinergis dan terintegrasi.
2. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Bidang dan Sekretaris wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Lhokseumawe.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dimungkinkan terjadi perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 bila diperlukan.
4. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2020. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Lhokseumawe, 23 Agustus 2019

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE  
KEPALA PELAKSANA,**

**NOFENDI, S. Sos**